

## BAB II

### PROBLEMATIKA DAN LANDASAN KERJASAMA SISTER CITY YANG TERJALIN ANTARA KOTA PADANG DENGAN KOTA HILDESHEIM

Dalam melakukan suatu hubungan kerjasama antara dua negara atau sub pemerintah, pertama sekali haruslah saling mengetahui dinamika apa saja yang terdapat di masing-masing negara dan kota terkait, agar saling mengenal dan memahami antara keduanya. Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana dinamika yang terdapat di Kota Padang dan Kota Hildesheim, berikut merangkup sejarah, geografis, demografis, perekonomian dan dengan kota atau negara mana sajakah masing-masing kota tersebut bekerjasama.

#### 1. Problematika Sister City

Secara historis, konsep tentang kota kembar/ *sister city* berawal dari munculnya Municipal International Cooporetioan (MIC) yang merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas atau pemerintah kota, distrik, provinsi atau negara bagian.<sup>1</sup> Pada bagian ini juga diuraikan tentang bagaimana alasan dan faktor mengapa dua daerah setingkat menjalin sebuah hubungan *sister city*. Konsep *sister city* sendiri mulai dipraktekkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950an, konsep ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, yang menyampaikannya melalui sebuah forum. Selanjutnya konsep ini banyak dipraktekkan di berbagai negara, termasuk juga dilakkukan oleh beberapa daerah di Indonesia, khususnya setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pasca-Orde Baru. Era otonomi daerah telah memberikan momentum yang tepat bagi berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan berbagai bidang dengan berbagai kota ataupun daerah yang setingkat dikancah internasional, dan tentu saja hal ini sangat baik untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan diberbagai daerah yang ada di Indonesia.

Kemudian komunitas *sister city* internasional juga menyebutkan definisi kerjasama tersebut bahwa, hubungan *sister city*, negara, atau *state* adalah kemitraan jangka panjang berbasis luas antara dua komunitas di dua negara. Hubungan diakui secara resmi setelah

---

<sup>1</sup>Rumengan, J. (2009), "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah".  
Jurnal Hukum Internasional.

pejabat tertinggi yang dipilih atau ditunjuk dari kedua komunitas menandatangani perjanjian untuk menjadi kota kembar. Sebuah kota dapat memiliki sejumlah kota kembar, dengan keterlibatan masyarakat mulai dari setengah lusin hingga ratusan relawan. Selain sukarelawan, organisasi kota kembar dapat mencakup perwakilan dari organisasi nirlaba, pemerintah kota, sektor swasta, dan organisasi masyarakat lainnya.

Setiap organisasi sister city bersifat independen dan mengejar kegiatan dan bidang tematik yang penting bagi mereka dan komunitas mereka termasuk pertukaran kota, bisnis, perdagangan, pendidikan, dan budaya serta proyek-proyek dengan sister city mereka. Hubungan kerjasama ini sendiri bisa saja jika sewaktu-waktu dihentikan maupun tetap dilanjutkan oleh pihak-pihak yang bekerjasama. Tergantung pada kesepakatan dan keputusan antara kedua belah pihak. Misi organisasi atau komunitas sister city ini biasanya adalah untuk mempromosikan perdamaian yang dilakukan melalui cara saling menghormati, pengertian, dan kerja sama - satu individu, satu komunitas pada suatu waktu tertentu.

Adapun tujuan dari sister city tersebut sangat beragam, diantaranya mengembangkan kemitraan kota-kota maupun daerah yang ada diseluruh dunia dengan berkolaborasi dengan kota, kabupaten, dan negara bagian dan yurisdiksi serupa di negara lain. Memberikan peluang bagi pejabat kota dan warga negara untuk mengalami dan menjelajahi budaya lain melalui kemitraan jangka panjang dengan masyarakat. Menciptakan suasana di mana pembangunan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat. Menstimulasi lingkungan tempat komunitas akan secara kreatif belajar, bekerja, dan menyelesaikan masalah bersama melalui pertukaran, proyek, budaya, bisnis, profesional dan teknis timbal balik dan proyek. Berkolaborasi dengan berbagai instansi dan organisasi di berbagai negara yang lebih maju di belahan dunia lain agar tujuan dan *goals* yang ingin dicapai dapat berhasil.

Dari berbagai uraian definisi, tujuan dan latar belakang diatas, hubungan kerjasama sister city ini tentunya dalam perjalanannya juga mengalami berbagai polemik dan dinamika antara kedua kota atau daerah yang bekerjasama, terdapat beberapa contoh problematika sister city yang dijalin oleh berbagai kota di Indonesia yaitu seperti kota Semarang dengan salah satu kota di China yaitu Beihai. Hubungan kerjasama antara kedua kota ini sudah dijalin dan dibentuk MoU sejak tahun 2008, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut sehingga kerjasama terhenti. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama tersebut terhenti adalah dari pihak Pemkot Semarang tidak ada inisiatif untuk melakukan gagasan ide untuk

program keberlanjutan sister city. Sedangkan dari pihak Beihai tidak lain adalah karena faktor kebijakan pemimpin pada saat itu.

## 2. Problematika Kota Padang

### 2.1) Sejarah Kota Padang

Dalam hal penamaan kota Padang dituliskan dari beberapa sumber bahwa pada zaman dahulunya dataran kota ini masih sangat sepi dan kebanyakan wilayahnya merupakan padang rumput yang luas atau semacam lapangan tanpa bangunan, dan menjadikan penamaannya sesuai dengan kondisi geografisnya yang seperti padang rumput, menjadi Padang. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa penamaan kota ini juga disamakan dengan kata “Pedang” dan pada akhirnya berubah menjadi Padang.<sup>2</sup> Wilayah kota inipun masih berada dibawah impinan kerajaan Pagaruyung pada zaman dahulu.<sup>3</sup> Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak (penamaan untuk tiga wilayah di kawasan minangkabau pada zaman dahulu).<sup>4</sup>

Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.<sup>5</sup> VOC berhasil mengembangkan Kota Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> [Colombijn](#). *Paco-Paco (Kota) Padang*. hlm. 55. Diakses pada 27 Oktober 2018

<sup>3</sup> Cortesão, Armando (1944). *The Suma Oriental of Tomé Pires*. 2. London: Hakluyt Society.

<sup>4</sup> Colombijn, Freek (1996). "Padang". 13 (4): 281–288. Diakses pada 28 Oktober 2018.

<sup>5</sup> NA. VOC 1277. Mission to Pagaruyung. fols. 1027r-v. Diakses pada 28 Oktober 2018.

<sup>6</sup> <https://lifestyle.okezone.com/read/2011/05/16/408/457626/abad-17-kota-padang-pernah-jadi-kota-metropolitan>. Diakses pada 28 Oktober 2018.

Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tengah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini.<sup>7</sup> Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Môme, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.<sup>8</sup> Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.<sup>9</sup>

Gambar.1 Lambang Kota Padang Zaman Hindi Belanda, diadopsi tahun 1926



Menjelang masuknya tentara Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan

<sup>7</sup> Marsden, William (1784). *The History of Sumatra: Containing an Account of the Government, Laws, Customs and Manners of the Native Inhabitants, with a Description of the Natural Productions, and a Relation of the Ancient Political State of That Island*.

<sup>8</sup> Piat, Denis (2007). *Pirates and Corsairs in Mauritius*. Christian le Comte. Diakses 28 Oktober 2018.

<sup>9</sup> Keat, G.O. (2004). *Southeast Asia: a Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor*.

diri ke Australia.<sup>10</sup> Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.<sup>11</sup>

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom.

Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.<sup>12</sup> Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman).<sup>13</sup>

## 2.2) Geografis Kota Padang

---

<sup>10</sup> Muljana, Slamet (2008). *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. 2. PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 2.

<sup>11</sup> Safwan, Mardanas (1987). *Sejarah Kota Padang*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

<sup>12</sup> [legislasi.mahkamahagung.go.id](http://legislasi.mahkamahagung.go.id) Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Diakses pada 27 Oktober 2018.

<sup>13</sup> <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/36839-padang-dan-padang-pariaman-jadi-metropolitan-baru>. Diakses pada 28 Oktober 2018

Gambar. 2 Gambar Geografis Kota Padang



Memiliki luas total 694,96 km<sup>2</sup>, lebih dari 60% wilayah Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung, Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Hanya sekitar 205,007 km<sup>2</sup> wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan.<sup>14</sup> Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatera. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan.<sup>15</sup>

Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.

<sup>14</sup> [http://www.padang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=59](http://www.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59). Diakses pada 29 Oktober 2018

<sup>15</sup> <http://www.ppk-kp3k.dkp.go.id> *Profil Pulau Pisang Gadang*. Diakses pada 29 Oktober 2018.

Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C–32 °C pada siang hari dan 22 °C–28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%–81%.<sup>16</sup> Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.

### 2.3) Demografi Kota Padang

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling padat di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 833.584 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dari data kependudukan tahun 2008 (856.815 jiwa) akibat peristiwa gempa bumi 2009.<sup>17</sup> Pada akhir tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian 273.915 Kepala Keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan.<sup>18</sup> Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.<sup>19</sup>

Tabel. 1 Tabel Demografi Kota Padang

Tahun	1819	1874	1930	1971	1980	1990	2008	2010	2014	2016
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>16</sup> <http://www.padang.go.id> *Profil Geografis Kota Padang*. Diakses pada 29 Oktober 2018.

<sup>17</sup> [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id) *Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kota Padang*. Diakses pada 30 Oktober 2018.

<sup>18</sup> *Data Kependudukan Harus Akurat*, *Harian Sinqqalang*. Diakses 30 Oktober 2018.

<sup>19</sup> <http://www.jakartacitydirectory.com> *Pemutakhiran Data Kependudukan di Padang*. Diakses pada 30 Oktober 2018

<b>Jumlah penduduk</b>	8.500	25.000	52.054	195.912	480.607	631.263	856.815	833.584	1.000.096	902.413
------------------------	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

### Kependudukan Kota Padang

#### Sumber:

[https://padangkota.bps.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=25&Itemid=9](https://padangkota.bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=9)

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Padang adalah etnis Minangkabau sebagai suku mayoritas di daerah tersebut. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk Kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.<sup>20</sup> Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri. Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaaur dan biasanya berbahasa Minang.<sup>21</sup>

Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di Kota Padang sudah melupakan budayanya. Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni Kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).

#### 2.4)Perekonomian Kota Padang

Padang merupakan kota yang mengandalkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi penopang perekonomian dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal ini terjadi

<sup>20</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275196000108?via%3Dihub>. Diakses pada 30 Oktober 2018.

<sup>21</sup> [Amran, Rusli](#) (1988). *Padang Riwayatmu Dulu*. Yasaguna.

karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun di sisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.<sup>22</sup> Di kota ini juga terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia, dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun.<sup>23</sup>

Hampir 63% dari produksinya (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Pusat perdagangan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, pasar tradisional ini pernah menjadi sentra perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu pada era 1980-an.<sup>24</sup> Selain itu, aktivitas perniagaan di Padang juga didukung oleh 16 pasar lainnya yang tersebar di seluruh pelosok kota, sembilan di antaranya dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Pasar Alai, Pasar Bandar Buat, Pasar Belimbing, Pasar Bungus, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Simpang Haru, Pasar Siteba, Pasar Tanah Kongsi, dan Pasar Ulak Karang.

Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Padang terbilang cukup lamban. Pada tahun 1990-an terdapat setidaknya lima permohonan izin pendirian mal di Kota Padang yang ditolak oleh Zuiyen Rais, wali kota Padang saat itu, karena mengambil lokasi di pusat kota. Pusat perbelanjaan modern yang beroperasi saat ini di Kota Padang di antaranya yaitu Plaza Andalas, Basko Grand Mall, Rocky Plaza, Transmart dan SPR Plaza. Untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah Kota Padang juga tidak memberi izin jaringan ritel waralaba berbentuk minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah menjamur di berbagai kota di Indonesia. Sebagai gantinya, jaringan minimarket Minang Mart dibentuk oleh Badan Usaha

---

<sup>22</sup> Sutaat (2002). *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2002*. Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial, Republik Indonesia.

<sup>23</sup> <http://www.semenpadang.co.id> Kapasitas Produksi. Diakses pada 31 Oktober 2018.

<sup>24</sup> Lauw, Andreas (1996). "Kinerja & Restrukturisasi BUMN". *Informasi*. 17 (191-196).

Milik Daerah (BUMD) PT Grafika Jaya Sumbar yang bekerja sama dengan PT Sentra Distribusi Nusantara.<sup>25</sup>

Perekonomian Kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata, industri dan pertanian. Hal ini didukung oleh keberadaan sederet hotel dan gedung pertemuan di kota ini. Hingga saat ini Kota Padang telah memiliki puluhan hotel berbintang, termasuk di antaranya satu hotel bintang 5 dan delapan hotel bintang 4. Minangkabau International Convention Center (MICC) yang saat ini dalam tahap konstruksi akan menjadi gedung pertemuan terbesar di Kota Padang.

## 2.5) Mitra sister city kota padang

Selain dengan Hildesheim, kota padang juga bekerjasama dengan beberapa kota yang ada diluar negeri, tak lain tujuannya adalah untuk menunjang berbagai aspek pendorong kemajuan kota itu sendiri, diantaranya:

### a. Kota Vung Tau, Vietnam

Vungtau adalah sebuah kota di provinsi Provinsi Bà Rịa–Vũng Tàu, 120 km sebelah timur Kota Ho Chi Minh. Kota ini adalah wilayah pertambangan minyak terkemuka di Vietnam. Selain itu, kota ini juga termasuk kawasan pariwisata yang paling penting di Vienam dengan adanya banyak pantai yang indah karakteristik kedua daerah tersebut Secara Geografis Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama kota pesisir. Kota Padang berada dipesisir, Kota Padang dan Kota Vung Tau sama-sama memiliki pelabuhan.<sup>26</sup> Kemudian selain persamaan geografis, demografis kedua kota tersebut juga tidak jauh berbeda, pun juga terkait tentang perekonomian yang bergerak dikedua kota ini yaitu dibidang pertanian dan pariwisata. Dari beberapa persaman tersebutlah Kota Padang dan Kota Vung Tau menyepakati sebuah kerjasama untuk pertukaran informasi, saling bertukar budaya dan menunjang perekonomian masing-masing.

### b. Kota Frementle, Australia

---

<sup>25</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/859653/buka-300-gerai-di-sumatera-barat-berikut-strategi-minang-mart>. Diakses pada 15 November 2018.

<sup>26</sup> Arnold. 2016. "Informasi kota Vung Tau Vietnam". <http://www.noltime.com/informasi-kota-vung-tau-vietnam.html>. Diakses pada 25 Desember 2018.

Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang selalu berupaya untuk memperbaiki perekonomian dan sektor lainnya pendukung berdirinya kota yang mandiri dan nyaman. Sister city dinilai cukup efektif untuk membantu mewujudkan hal tersebut, selain membuka jalan kerjasama dengan salah satu kota di Vietnam, dan Hildesheim, Padang juga menandatangani perjanjian kerjasama sister city atau kota kembar dengan salah satu negara bagian di Australia Barat yaitu Fremantle. Ada beberapa perjanjian atau bidang-bidang yang disepakati kedua belah pihak guna menjalin sister city tersebut yaitu sektor pariwisata dan budaya, perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.<sup>27</sup>

### **3. Problematika Kota Hildesheim**

#### **3.1) Sejarah Kota Hildesheim**

Jerman sebagai negara pusat yang berada tepat pada jantung Benua Eropa merupakan negara besar yang sangat terkenal sektor industri dan perdagangan elektronik dan transportasinya. Sebagai Negara Republik Federasi, dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan Dasar negara Demokrasi yang dituangkan dalam Konstitusi (Grundgesetz) tahun 1949 dan dipimpin oleh seorang presiden. Hildesheim sendiri termasuk kepada Jerman bagian utara, masuk pada distrik Hildesheim yang termasuk pada wilayah Lower Saxony yang tergabung dalam negara bagian Niedersachsen. Hildesheim merupakan salah satu kota tertua di Jerman utara dan merupakan pasar penting dijalur perdagangan Hellweg.<sup>28</sup> Seringnya terjadi pergolakan PD II di Jerman pada saat itu, ikut meluluhlantakkan kota kecil ini. Kota ini rusak parah oleh serangan udara pada tahun 1945.

Kota bersejarah ini dibom sebagai bagian dari Petunjuk Pemboman Area untuk merusak moral rakyat Jerman. Seperti yang dituliskan oleh salah satu website resmi kota Hildesheim, bahwa Hildesheim memiliki sejarah panjang. Pada tahun 815 Hildesheim termasuk kepada pemerintahan kerajaan uskup yang didirikan oleh Kaisar Ludwig the Pious, berdasarkan pemukiman Saxon yang ada. Kemudian sekitar tahun 1249 Hildesheim menerima hak istimewa kota, tetapi bangunan balai kotanya sendiri sudah ada sejak tahun 1217. Sudah sejak tahun 1300, kota ini sebagian besar independen dari kedaulatan uskup, dan

---

<sup>27</sup> Berita Perwakilan. 2018. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/PEMBENTUKAN-SISTER-CITY-KOTA-PADANG,-INDONESIA-DENGAN-KOTA-FREEMANTLE,-AUSTRALIA-BARAT>. Diakses pada 26 Desember 2018.

<sup>28</sup> Neigenfind, W. : Unsere schöne Stadt, p.46. Hildesheim 1964

dapat mengeluarkan undang-undang kota sendiri. Kota Hildesheim terletak di ujung ibu kota kerajaan lama keuskupan pangeran Hildesheim. Disebutkan pula pada situs tersebut dengan judul “Verwaltungsgeschichte” yang berarti sejarah manajemen, bahwa pada tahun 1802 Setelah sekularisasi keuskupan, kota dan keuskupan jatuh ke Prusia setelah perjanjian damai Paris. Kemudian tidak lama selang kota dan keuskupan jatuh ketangan Prusia yakni tahun 1806 Setelah kekalahan Prusia di Jena dan Auerstedt, kota di Kerajaan Westphalia yang baru dibentuk adalah ibu kota distrik Hildesheim di departemen Oker. Lalu pada tahun 1813 setelah tragedi kekalahan Prusia, melalui kesepakatan antara Prusia dan Hanover, yang dikonfirmasi pada Kongres Wina, Kerajaan Hildesheim dinyatakan masuk kepada Kerajaan Hanover. Sepuluh tahun berlalu yakni pada tahun 1823 Kota ini menjadi kota terpenting di Hanoverian. Lalu pada 1866 Hildesheim menjadi pusat pemerintahan distrik Prusia Hildesheim. Selanjutnya pada 1938 wilayah perkotaan diperluas oleh desa Neuohof (distrik Marienburg) dan Drispensstedt (distrik Hildesheim). Setelah melewati berbagai dinamika dan sejarah panjang, akhirnya pada tahun 1974 kota Hildesheim dimasukkan ke dalam distrik Hildesheim hingga saat ini.

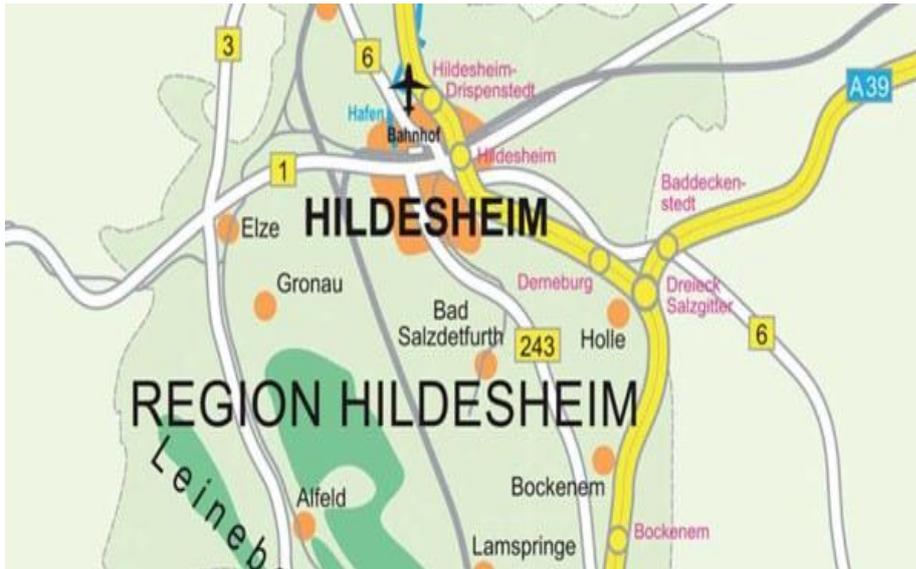
### 3.2) Geografis Kota Hildesheim

Kota kecil yang penuh dengan sejarah panjang ini terletak 238km sebelah timur Kota Berlin, dan 156km Utara Kota Hamburg. Hildesheim terletak di perbatasan Innerstebergland dan Hildesheimer Börde terutama di tepi kanan sungai Innerste. Kota ini terletak di utara hutan Hildesheimer dan barat-barat laut punggung Vorholz. Di pinggiran barat laut berbatasan dengan pegunungan Giesen. Batas kota Hildesheim mencapai di utara dan timur menjadi kurang dari 15 km ke Hanover (Bockmerholz) dan Salzgitter (Osterlinde) dan hingga kurang dari 30 km ke batas kota Braunschweig (Ellernbruch). Jarak ke kota-kota besar berikutnya di selatan dan barat berada dalam urutan 50-100 km (Gottingen di selatan Lower Saxony serta Paderborn dan Bielefeld di Rhine-Westphalia Utara).<sup>29</sup>

Peta. 3 Peta Kota Hildesheim

---

<sup>29</sup> Hauptsatzung. <https://www.stadt-germany.de/verwaltung/hauptsatzung>. Diakses pada 30 Oktober 2018.



Sumber: Hildesheim.de/leben-in-hildesheim/soziales-und-gesellschaft

### 3.3) Demografis Kota Hildesheim

Hasil sensus yang dituangkan pada salah satu situs resmi Kota Hildesheim yaitu Zensus Hildesheim Stad atau sensus Kota Hildesheim pada tahun 2011 tercatat, hasil proporsi dari masyarakat Hildesheim yakni 16% dari populasi Hildesheim merupakan remaja berusia di bawah 18 tahun, 17% berusia 18 hingga 29 tahun, 26% berada pada kelompok usia 30 hingga 49 tahun, 19% berusia 50 hingga 64 tahun dan 22% berusia 65 tahun ke atas. Wanita adalah mayoritas dengan persentasi mencapai 53%. Dari total penduduk yang mendiami wilayah Hildesheim tersebut 23% nya adalah penduduk yang memiliki latar belakang migrasi.<sup>30</sup>

Tabel. 2 Tabel Sensus Kota Hildesheim tahun 2011

Tahun	Populasi
<b>Desember 2011</b>	99.267 Jiwa
<b>Desember 2012</b>	99.224 Jiwa
<b>Desember 2013</b>	99.390 Jiwa

<sup>30</sup> Zensus 2011. [https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:032540021021,KENNZ\\_WOHN,m](https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:032540021021,KENNZ_WOHN,m). Diakses pada

<b>Desember 2014</b>	99.979 Jiwa
<b>Desember 2015</b>	101.667 Jiwa
<b>Desember 2016</b>	101.687 Jiwa
<b>Desember 2017</b>	101.744 Jiwa

Sumber :

[https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:032540021021,KENNZ\\_WOHN,m](https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:032540021021,KENNZ_WOHN,m),

Dari data diatas bisa disimpulkan, bahwa dari bulan Desember 2011 sampai Desember 2017 angka penduduk yang menetap di Kota Hildesheim mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak relativ banyak, alasanya karena bebrapa penduduk adalah migrasi dari luar Hildesheim ataupun dari luar Jerman.

#### 3.4) Perekonomian Kota Hildesheim

Sebagai kota tua yang menyimpan cerita sejarah panjang yang menarik, ditambah dengan keberadaan banyaknya bangunan tua seperti katedral dan bangunan cagar budaya lainnya, menjadikan sektor pariwisata juga menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan bagi kota Hildesheim. Selain itu juga, sumber penghasilan masyarakat di kota ini juga ditopang oleh berbagai macam perusahaan Multinasional yang beroperasi seperti, perusahaan yang paling penting adalah Bosch, selain itu, pemimpin pasar dunia dan produsen giroskop AutoGyro juga berbasis di lapangan udara Hildesheim, lokasi produksi dan logistik minuman Coca Cola juga beroperasi di Hildesheim, jadi di beberapa perusahaan besar tersebut sudah menyerap banyak tenaga kerja di kota ini. Dari salah satu situs resmi Kota Hildesheim, pada bagian perekonomian atau dalam bahasa jerman “die Wirtschaft” dituliskan bahwa sebagian masyarakatnya juga merupakan karyawan jaminan sosial di sektor jasa, industri manufaktur dan di bidang industri mobilitas (fokus pada pasokan otomotif), teknik elektro, dan pemrosesan logam.

#### 3.5) Mitra sister city Kota Hildesheim

a. Kota Padang. Padang merupakan salah satu kota mitra kerjasama sister city, oleh kota Hildesheim yang pada penelitian ini menjadi objek pembahasan. Dimana kerjasama yang terjalin antara kedua kota sudah semenjak bulan Juli tahun 1988. Pada saat itu kerjasama yang disepakati meliputi beberapa bidang seperti pertukaran

pelajar, pertukaran informasi kebudayaan, tata kelola perkotaan dan revitalisasi bangunan bersejarah. Jika ditelisik dari sisi Hildesheim sendiri, alasan untuk melakukan hubungan kerjasama ini adalah lebih kepada, agar adanya *connection people to people*, dan pertukaran budaya juga informasi.

Terkhusus pada bidang kebudayaan dan revitalisasi bangunan bersejarah, Hildesheim sangat tertarik untuk mempelajari dan meneliti konstruksi “Rumah Gadang” (rumah adat suku minangkabau yang mendiami kota Padang) yang mempunyai struktur tahan gempa dan dibuat tanpa bantuan paku atau hanya dipasak. Jika dilihat dari sisi kota Padang tentunya alasan utama karena kota Hildesheim bisa menjadi contoh yang baik untuk membangun kotanya dan bisa menjadi contoh sumber daya manusia yang baik bagi kota tersebut.

- b. Hildesheim dengan Kota Weston-super-Mare, Vereinigtes Königreich pada 1983 Kerjasama yang terjalin, berupa pertukaran informasi dan perkembangan sumber daya manusia.
- c. Hildesheim dengan Kota El Minia, Ägypten, pada 1979, yakni kerjasama yang terjalin dilakukan dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya.